



Kehidupan sosial budaya etnis Tionghoa di Sidoarjo pada masa kolonial

Socio-cultural life of the Chinese in Sidoarjo during the colonial period

Yunanto Setiawan, Yudi Prasetyo

yunanto206@gmail.com, prastyudi19@gmail.com

STKIP PGRI Sidoarjo, Jl. Raya Kemiri, Kemiri, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61234, Indonesia

Corresponding email: yunanto206@gmail.com

ARTICLE INFO

Received: April 30, 2021

Revised: May 26, 2023

Accepted: July 09, 2023

Published: June 30, 2023

Permalink/DOI

10.17977/um020v17i12023p56-65

Copyright © 2023.

Sejarah dan Budaya

Email: jsb.journal@um.ac.id

Print ISSN: 1979-9993

Online ISSN: 2503-1147

How to Cite APA Style:

Setiawan, Y., & Prasetyo, Y. (2023). Kehidupan sosial budaya etnis tionghoa di sidoarjo pada masa kolonial. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 17(1), 56-65.

<https://dx.doi.org/10.17977/um020v17i12023p56-65>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) license.

ABSTRACT

This study aims to describe the socio-cultural life of the Chinese in Sidoarjo during Dutch colonialism. The main focus highlighted was the colonial government's policy towards Chinese descent in Sidoarjo. As well as how the Chinese descent adapts to the culture of the surrounding community, thus changing the social status of the Chinese. This study uses a historical method. This study combines literature reviews from libraries, e-journals, and field research by seeking oral sources. Oral sources are needed to strengthen or complement written sources. The results of the study explained that the policies issued by the colonial government had influenced the socio-cultural life of Chinese descent. In addition, the Western-style education received by the younger generation of Chinese has raised their status among the people. By mastering the Dutch language and dressing in a Western-style, the younger generation of Chinese is in the middle class.

KEYWORDS

Chinese; Sidoarjo; colonialism

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kehidupan sosial budaya etnis Tionghoa di Sidoarjo pada masa kolonialisme Belanda. Fokus utama yang disorot adalah kebijakan pemerintah kolonial terhadap orang-orang Tionghoa di Sidoarjo. Serta bagaimana orang-orang Tionghoa menyesuaikan diri dengan budaya masyarakat disekitarnya, sehingga membuat status sosial orang Tionghoa berubah. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis. Penelitian ini mengkombinasikan antara kajian literatur dari perpustakaan, e-jurnal, dan penelitian lapangan dengan mencari sumber-sumber lisan. Sumber lisan diperlukan untuk memperkuat ataupun melengkapi sumber-sumber tertulis. Hasil penelitian memaparkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial telah mempengaruhi kehidupan sosial-budaya orang-orang Tionghoa. Selain itu, pendidikan ala barat yang diterima oleh generasi muda Tionghoa telah mengangkat derajat mereka dikalangan masyarakat. Dengan menguasai bahasa Belanda dan berpakaian ala Barat membuat generasi muda Tionghoa berada di kelas menengah.

KATA-KATA KUNCI

Tionghoa; Sidoarjo; kolonialisme

PENDAHULUAN

Belum diketahui secara pasti sejak kapan etnis Tionghoa berada di Kabupaten Sidoarjo, namun diperkirakan tahun kedatangan etnis Tionghoa di Sidoarjo berhubungan dengan sejarah etnis Tionghoa di Surabaya. Hal ini dikarenakan Sidoarjo pernah menjadi bagian dari Surabaya. Pada tahun 1851, Sidoarjo masih bernama Sidokare sebagai bagian dari daerah Kadipaten Surabaya. Sidokare dipimpin oleh seorang patih yang bernama R. Ng. Djojohardjo yang tinggal di Pucanganom. Beliau dibantu oleh seorang Wedana yang bernama Bagus Ranuwirjo ([Panitia Penggali Sejarah Kabupaten Sidoarjo, 2009](#)).

Pemisahan Sidokare dari wilayah kekuasaan Kadipaten Surabaya tak terlepas dari pemberontakan yang dilakukan oleh Adipati Jayenggrana. Pemberontakan yang dilakukan oleh Jayenggrana ini membuat Belanda memecah wilayah Surabaya ([Sidoarjo, 2006](#)). Pada tahun 1859, Pemerintah Hindia Belanda mempersempit wilayah Kadipaten Surabaya. Kadipaten Surabaya terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidokare. Untuk wilayah Kabupaten Sidokare sendiri diangkatlah seorang Bupati yang bernama RTP Tjokronegoro I yang berasal dari Kasepuhan. Beliau merupakan putra dari RAP Tjokronegoro yang merupakan Bupati Surabaya ([Panitia Penggali Sejarah Kabupaten Sidoarjo, 2009](#)).

Perubahan nama Sidokare menjadi Sidoarjo diawali dengan keluarnya keputusan Gubernur Jenderal No. 10 tanggal 28 Mei 1859. Mengacu dari keputusan Gubernur Jenderal tersebut maka dibuatlah *Staatsblad van Nederlandsch Indië* (Lembaran Negara Hindia Belanda) No. 32 yang diundangkan pada tanggal 2 Juni 1859. Pada lembaran tersebut disebutkan bahwa *Regentschap* (Kabupaten) Sidhokarie diubah namanya menjadi Sidho – Ardjo. Pada tahun 1970-an, lahirlah EYD (Ejaan Yang Disempurnakan). Sehingga nama Sidhoardjo diganti menjadi Sidoarjo seperti yang dikenal sekarang ([Widodo & Nurcahyo, 2013](#)). Sejak masa kolonial Sidoarjo telah salah satu kabupaten penopang perekonomian Surabaya. Di Sidoarjo terdapat beberapa sentra industri batik yang terletak di Jetis, Kedungcangkring, Sekardangan. Sentra – sentra batik tersebut telah lama berkembang sejak masa Kolonial ([Christian, 2017](#)). Selain batik, di Sidoarjo juga terdapat beberapa pabrik gula yang terletak di Candi, Krembung, dan Tulangan.

Secara umum, mayoritas penduduk yang menetap di Kabupaten Sidoarjo adalah suku Jawa. Sejak 1859, pertumbuhan penduduk di Sidoarjo mengalami peningkatan. Hal ini bukan disebabkan oleh banyaknya angka kelahiran, melainkan banyaknya jumlah perantauan yang datang dan menetap di Sidoarjo ([Ahmad, 2021](#)). Kelompok perantauan tersebut berasal dari suku Madura, etnis Tionghoa dan etnis India. Pada masa kolonialisme Belanda, Pemerintah Kolonial membagi masyarakat di Indonesia menjadi tiga lapisan, yaitu kelas atas yang terdiri dari orang – orang Kolonial, kelas menengah yang terdiri dari peranakan Eropa, India, dan Tionghoa, serta kelas bawah yang diisi oleh orang pribumi. Hal tersebut juga berlaku untuk orang Jawa. Walaupun suku ini merupakan mayoritas di Kabupaten Sidoarjo, namun Pemerintahan Kolonial tidak menggolongkan orang – orang Jawa ini sebagai sebuah golongan etnis tersendiri, akan tetapi menjadi sebuah kesatuan dengan golongan – golongan yang disebut sebagai *Inlander* atau Pribumi. Sebutan ini tidak hanya ditujukan untuk orang Jawa saja, melainkan sudah menjadi julukan umum untuk membedakan orang – orang asli Indonesia dengan bangsa – bangsa pendatang seperti Eropa, Arab dan Tionghoa ([Basundoro,](#)

2012). Pada umumnya orang – orang Tionghoa yang datang ke Sidoarjo berasal dari daerah Guangdong, Hokkian, dan Hainan (Christian, 2017). Terdapat 4 golongan suku bangsa yang merantau dan tersebar di wilayah Indonesia, antara lain: *Hakka, Kanton, Teo Chiu* dan *Hokkien*.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kehidupan sosial budaya etnis Tionghoa di Sidoarjo pada masa kolonialisme. Fokus utama yang disorot adalah kebijakan pemerintah kolonial terhadap orang – orang Tionghoa di Sidoarjo. Kebijakan – kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial telah melahirkan pandangan bahwa orang – orang Tionghoa merupakan kelompok masyarakat yang bersifat eksklusif dan cenderung memisahkan diri dari masyarakat pribumi. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana orang – orang Tionghoa menyesuaikan diri dengan budaya masyarakat disekitarnya. Penyesuaian diri tersebut telah membuat status sosial orang - orang Tionghoa berubah. Adaptasi yang dilakukan oleh orang – orang Tionghoa pada masa kolonialisme melahirkan beberapa tren baru dalam kalangan etnis Tionghoa. Tren baru yang dimaksud antara lain cara berpakaian, gaya rambut, serta lahirnya rumah toko (ruko) yang kemudian terus bertahan hingga kini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis analitis. Tahapan implementasinya diawali dengan: *pertama*, heuristik berupa pengumpulan berbagai sumber terkait. Selain sumber tertulis, peneliti juga memerlukan sumber lisan. *Kedua*, kritik atau verifikasi sumber, proses pengujian kredibilitas sumber yang terkumpul. *Ketiga*, interpretasi, proses analisis dan penafsiran data. Keempat, historiografi yang merupakan puncak dari sebuah penelitian sejarah. Peneliti pada fase ini mencoba memahami peristiwa sejarah sebagaimana terjadinya. Setelah peneliti melakukan serangkaian proses pengumpulan data, verifikasi atau kritik sumber hingga interpretasi yang kemudian dilanjutkan dengan proses penulisan cerita sejarah atau yang disebut historiografi. Sebagai fase terakhir dalam metode sejarah, historiografi merupakan cara penulisan dan pemaparan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan (Kuntowijoyo, 2018).

Penelitian ini termasuk ke dalam *library research* dan *field research*, hal ini karena penelitian ini mengkolaborasikan antara kajian literatur dari perpustakaan serta *e-journal* dan penelitian lapangan dengan mencari sumber – sumber lisan. Sumber lisan diperlukan untuk memverifikasi keterangan tentang bagaimana etnis Tionghoa di Indonesia pada masa kolonial yang diperoleh dari literatur, serta memastikan bahwa keterangan tersebut juga sesuai dengan apa yang terjadi di Sidoarjo. Selain itu sumber lisan juga berfungsi sebagai pelengkap dari keterangan yang belum ada di literatur. Sumber lisan yang dimaksud adalah warga keturunan Etnis Tionghoa yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terbentuknya Kawasan Pecinan Sidoarjo

Orang – orang Eropa adalah kelompok minoritas yang mampu menguasai mayoritas penduduk yang tinggal di Sidoarjo. Walaupun secara kuantitas tidak sebanyak orang – orang Jawa namun secara stratifikasi sosial dan politik, orang – orang Eropa jauh diatas orang – orang Pribumi. Sedangkan orang – orang Tionghoa dengan jumlah yang lebih sedikit

dibandingkan orang – orang Jawa, mereka mampu mendominasi dalam bidang ekonomi. Konsentrasi orang Tionghoa di Sidoarjo berada di wilayah pusat kota, dimana wilayah tersebut kemudian dikenal dengan sebutan kawasan pecinan. Pada tahun 1917, jumlah orang – orang Timur Asing yang terdiri dari Etnis Tionghoa, Arab dan India di Sidoarjo berjumlah 3.116 jiwa. Jumlah tersebut jauh lebih banyak jika dibandingkan orang – orang Eropa yang berjumlah 1.036 jiwa (Yusuf, 2022.).

Pemisahan antara Etnis Tionghoa dan Pribumi terjadi sejak zaman kolonial. Pemerintah Kolonial Belanda melarang orang – orang Timur Asing termasuk Etnis Tionghoa untuk tinggal di desa. Hal ini sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya goncangan sosial. Pemerintah Hindia Belanda percaya bahwa apabila orang – orang Tionghoa dan orang – orang Pribumi bergabung, maka akan menjadi ancaman terbesar bagi mereka. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah yakni menerapkan *wijkenstelsel* (sistem pemukiman). *Wijkenstelsel* merupakan peraturan yang mewajibkan orang – orang Tionghoa untuk tinggal di suatu kawasan yang sekarang populer dengan sebutan “Kawasan Pecinan” (Darini, 2011). Orang – orang Tionghoa baru boleh berpindah tempat tinggal, apabila memiliki “Pas Jalan”. Pas Jalan (*passen stansel*) adalah surat jalan yang wajib dimiliki oleh penduduk Timur Asing yang berada di Pulau Jawa ketika meninggalkan kawasan pemukiman Tionghoa yang berlaku selama 1 tahun. Pas Jalan resmi diberlakukan pada tahun 1863. Pas Jalan hanya diberikan oleh pejabat Hindia Belanda untuk orang- orang Timur Asing yang memiliki kepentingan industri dan perdagangan (Suryadinata, 2014). Kebijakan *wijkenstelsel* tersebut akhirnya membatasi kebebasan orang – orang Tionghoa untuk bersosialisasi dengan orang – orang Pribumi.

Wijkenstelsel juga erat kaitannya dengan sistem kepemimpinan diantara masyarakat Tionghoa. Pejabat Hindia Belanda menunjuk dan mengangkat seorang pemimpin dari golongan Tionghoa sendiri. Pemimpin ini diberikan jenjang pangkat yaitu mayor, kapiten, dan letnan. Pemimpin yang ditunjuk oleh Pejabat Hindia Belanda bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban Kawasan Pemukiman Tionghoa, dan mengadili atau memberikan putusan pada perkara di lingkungan masyarakat Tionghoa. Selain itu mereka juga memiliki tugas untuk mendata jumlah penduduk Tionghoa (kelahiran, kematian, dan perpindahan). Pemilihan pemimpin Tionghoa ini sebenarnya adalah hak dari masyarakat Tionghoa. Orang – orang Tionghoa baik Tionghoa totok maupun Tionghoa peranakan memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Namun pada kenyataannya Pejabat Hindia Belanda tetap campur tangan dalam proses pemilihan pemimpin Tionghoa tersebut. Pemimpin yang diangkat adalah pemimpin yang dinilai sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh Pejabat Hindia Belanda. Hasil dari pemilihan pemimpin untuk pemukiman Tionghoa ini seringkali menimbulkan kekecewaan mendalam pada masyarakat Tionghoa. Kekecewaan tersebut wajar karena sistem ini pada akhirnya menguntungkan bagi kepentingan pihak Belanda dan pemimpin Tionghoa itu sendiri daripada kepentingan masyarakat Tionghoa (Noordjanah, 2010).

Ketika di kota – kota lain sistem kepangkatan mayor, kapiten, dan letnan diberlakukan, kawasan Tionghoa di Sidoarjo hanya dipimpin oleh seorang letnan saja. Letnan Tionghoa (*Luitenant de Chinezen*) pertama adalah Kwee Soei Toan yang dilantik pada tanggal 10 Januari 1866. Kwee Soei Toan memimpin masyarakat Tionghoa di Sidoarjo

sampai tahun 1876. *Luitenant de Chinezen* kedua adalah The Tjing Liang yang dilantik pada tanggal 10 Oktober 1876. The Tjing Liang memimpin masyarakat Tionghoa di Sidoarjo sampai tahun 1891. *Luitenant de Chinezen* ketiga adalah Lo Bing Kie yang dilantik pada tanggal 30 Mei 1891. Lo Bing Kie memimpin masyarakat Tionghoa di Sidoarjo sampai tahun 1912. *Luitenant de Chinezen* keempat adalah The Sioe Sing yang dilantik pada tanggal 28 November 1912. The Sioe Sing memimpin masyarakat Tionghoa Sidoarjo sampai tahun 1926. *Luitenant de Chinezen* terakhir adalah Lim Tjing Hay yang dilantik pada tanggal 20 Agustus 1926. Tahun 1930-an hingga akhir kekuasaan Belanda di Indonesia jabatan *Luitenant de Chinezen* di Sidoarjo ditiadakan. Dalam kurun waktu tersebut masyarakat Tionghoa di Sidoarjo dibawah langsung oleh kepemimpinan Resident Surabaya ([Widodo & Nurcahyo, 2013](#)).

Pada awal terbentuknya Kawasan Pecinan Sidoarjo, luas jalan kurang lebih 4 meter. Kawasan Pecinan Sidoarjo adalah pusat pemukiman Etnis Tionghoa yang berada di tengah kota Sidoarjo. Selain itu kawasan ini juga merupakan pusat perdagangan orang – orang Tionghoa dan Pribumi. Di Kawasan Pecinan Sidoarjo juga terdapat sebuah pasar tradisional, yang kemudian dikenal oleh masyarakat sebagai “Pasar Krempyeng”. Dinamakan Pasar Krempyeng karena pasar tersebut hanya buka pada pagi hari ([Tedjokusumo, 2020](#)). Seiring berkembangnya waktu, Kawasan Pecinan tumbuh menjadi pusat perekonomian orang – orang Tionghoa. Banyak orang – orang Tionghoa yang kemudian mendirikan usaha dalam bentuk toko kelontong yang kelak menjadi cikal – bakal rumah toko (ruko) ([Prasetyo, 2020](#)).

Toko merupakan usaha yang melekat pada masyarakat Tionghoa. Alasan yang paling mendasar orang – orang Tionghoa memilih toko sebagai mata pencaharian adalah karena generasi pertama perantau Tionghoa kesulitan untuk mencari pekerjaan. Usaha toko yang dirintis oleh orang – orang Tionghoa telah menjadi sebuah usaha turun – temurun karena usaha toko dianggap sebagai usaha yang ideal untuk dikembangkan. Selain itu, usaha toko sendiri merupakan simbol kemandirian bagi masyarakat Tionghoa. Oleh karena itu, masyarakat Tionghoa lebih tertarik untuk mendirikan sebuah toko sendiri atau mengembangkan usaha keluarga dibandingkan bekerja dengan orang lain.

Adaptasi Sosial Budaya Etnis Tionghoa di Sidoarjo

Di Sidoarjo, seperti halnya di kota – kota lain di Pulau Jawa dan wilayah Indonesia yang lain, unsur – unsur kebudayaan dan bahasa orang Tionghoa lambat laun melebur ke dalam kebudayaan dan bahasa masyarakat di sekitarnya. Kaum perantau Tionghoa yang mayoritas pria menikah dengan perempuan - perempuan Pribumi. Selanjutnya perantau – perantau Tionghoa ini mengadopsi adat – istiadat di lingkungan sekitarnya ([Lombard, 2005](#)). Sehingga orang – orang Tionghoa pada akhirnya menggunakan bahasa daerah tempat mereka tinggal dan meninggalkan bahasa dari tanah leluhurnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Percampuran kebudayaan antara orang Tionghoa dengan orang Pribumi terbentuk dalam interaksi sosial yang saling menguntungkan. Pola interaksi terbentuk melalui aktivitas perdagangan sehari – hari.

Kebudayaan orang – orang Tionghoa mengalami perubahan, hal ini dikarenakan orang – orang Tionghoa menyesuaikan keadaan di Jawa. Hingga abad ke – 19, pakaian yang dikenakan peranakan Tionghoa merupakan kolaborasi antara unsur Tionghoa dan Jawa.

Kaum pria perananan Tionghoa masih mengenakan pakaian Cina Panjang dan kopiah batok. Kaum pria ini juga masih memakai kuncir. Sedangkan kaum perempuan perananan Tionghoa memakai kebaya dan mengunyah sirih ([Gambar 1](#)). Peranakan Tionghoa ini masih mempertahankan nama keluarga Tionghoa dan memakan daging babi ([Suryadinata, 2014](#)).



Gambar 1: perempuan Tionghoa mengenakan kebaya seperti orang Jawa
Sumber: digitalcollections.universiteitleiden.nl

Ketika memasuki era kolonial, terjadi pertemuan antara kebudayaan Tionghoa dengan kebudayaan barat yang dibawa oleh orang – orang Belanda. Sejak abad XX kebudayaan – kebudayaan barat mulai meresap kedalam kehidupan masyarakat Tionghoa. Kebudayaan barat semakin mudah terserap terlebih jika orang Tionghoa tersebut merupakan golongan elite. Golongan elite Tionghoa berupaya untuk menaikkan kelasnya dan mensejajarkan diri dengan orang – orang barat pada masa itu. Terjadinya proses transfer kebudayaan, pembentukan karakter, serta mentalitas barat terhadap orang – orang Tionghoa yang pada akhirnya membentuk sebuah identitas diri kebarat-baratan pada orang Tionghoa ([McCullagh, 2010](#)).

Dalam pergaulan sehari – sehari, pada awalnya orang – orang Tionghoa memakai Bahasa Jawa. Bahasa Jawa ini mulai dipergunakan oleh orang – orang Tionghoa pada awal abad XX. Dalam pemakaiannya, orang – orang Tionghoa dihadapkan dengan sistem kebahasaan yang sangat rumit. Sistem kebahasaan yang dimaksud adalah perbedaan yang wajib digunakan sesuai dengan kedudukan, pangkat, usia, dan tingkat keakraban dengan lawan bicara. Tiga strata pokok dalam Bahasa Jawa yaitu *ngoko* (strata tidak resmi), *madya* (strata setengah resmi), dan *krama* (strata resmi). Tiga strata tersebut masih ditambah lagi dengan 300 kosakata yang disebut *krama inggil*. Penggunaan tiga strata tersebut disesuaikan juga dengan etika, sopan santun, serta adat – istiadat Jawa ([Rustopo, 2007](#)).

Setelah pendidikan Barat masuk, kemampuan berbahasa Belanda juga menjadi sebuah modal awal yang memungkinkan terjadinya interaksi dan proses transfer mentalitas antara orang – orang Tionghoa dan Belanda. Kemampuan berbahasa asing merupakan sesuatu yang prestise di kalangan masyarakat bagi para penggunanya. Pendidikan Barat yang diterima oleh orang – orang Tionghoa perananan pada abad XX membuat status sosial mereka naik, terutama di lingkungan Etnis Tionghoa sendiri. Hal tersebut mempengaruhi

tingkat kepercayaan diri mereka di masyarakat. Perasaan percaya diri tersebut menjadi menjadi semakin tinggi sejak terbitnya *Wet op liet Nederlandsche Onderdaanschap* (Undang – Undang Kawula Belanda). Undang – undang tersebut membuat kaum peranakan Tionghoa merasa memiliki status sosial yang sama dengan para pejabat Belanda. Sementara orang – orang Tionghoa totok yang mayoritas masih memegang teguh ajaran leluhur ditempatkan di kelas kedua (Rustopo, 2007).

Pengaruh kebudayaan Barat juga mempengaruhi tren mode berpakaian orang – orang Tionghoa. Pakaian merupakan bagian dari identitas politik yang menggambarkan status atau derajat penggunaannya. Identitas seseorang dapat dilihat dari cara mereka berbusana. Pada tahun 1911, kaum elite Tionghoa di Sidoarjo mulai meninggalkan gaya berpakaian baju *tulkim*, celana komprang, dan *tungsa* dan beralih menggunakan jas terbuka, celana pantalon, dan dasi. Dari kalangan muda hingga kalangan tua, pria maupun wanita, pakaian Barat begitu diminati (Prasetyo, 2023). Gaya berpakaian tersebut umumnya diterapkan oleh generasi muda Tionghoa yang telah mendapatkan pendidikan ala Barat (Gambar 3). Hal ini berbeda dengan orang – orang Tionghoa totok yang masih memegang teguh kebudayaan dari negeri asalnya (Gambar 2).



Gambar 2: Orang Tionghoa yang masih mengenakan baju tulkim dan celana komprang.
Sumber: digitalcollections.universiteitleiden.nl



Gambar 3: Pemuda Tionghoa mengenakan jas dan dasi layaknya orang – orang barat.
Sumber: digitalcollections.universiteitleiden.nl

Orang – orang Tionghoa generasi kedua atau ketiga mayoritas berprofesi sebagai pedagang. Profesi tersebut menempatkan mereka sebagai kelompok kelas menengah dan berpenghasilan rata – rata masyarakat pada umumnya. Namun tidak jarang pula orang – orang Tionghoa tersebut berpenghasilan tinggi. Kekayaan merupakan salah satu faktor penting agar dapat mengenakan pakaian Barat karena merekalah orang kaya yang merupakan generasi Tionghoa pertama yang mengadopsi pengaruh modernisasi Belanda. Posisi mereka sebagai kelas menengah merupakan agen yang sesuai dengan perkembangan gaya berpakaian yang modern ([van Dijk, 2005](#)).

Pada awalnya, Orang – Orang Tionghoa peranakan tidak memeluk agama secara terorganisir. Salah satu golongan Orang Tionghoa mengembangkan Kong Kauw Hwee atau Perkumpulan Agama Konghucu. Namun kebanyakan orang – orang Tionghoa lebih percaya kepada pemujaan leluhur, menyimpan altar di rumah, dan beribadah di Kelenteng ([Suryadinata, 2014](#)). Orang - orang Tionghoa sendiri sebenarnya memiliki agama dan kepercayaan tradisional. Salah satu kepercayaan yang masih dilestarikan adalah pemujaan terhadap para leluhur, langit, dan dewa – dewa. Pemujaan terhadap roh leluhur, langit dan dewa – dewa merupakan kepercayaan “asli” dari orang – orang Tionghoa. Adat – istiadat tersebut merupakan simbol identitas dari etnis Tionghoa yang kemudian berakulturasi dengan etnis – etnis yang lain. Sebagai salah satu upaya menjaga tradisi adat – istiadat etnis Tionghoa, orang – orang Tionghoa mendirikan rumah abu dan perkumpulan berdasarkan marga ([Ika, 2013](#)).

Kedatangan bangsa Belanda membawa pengaruh terhadap kepercayaan dan agama orang – orang Tionghoa. Hal tersebut dapat dilihat dari ajaran Kristen Protestan dan Kristen Katolik yang mulai dikenal oleh orang – orang Tionghoa. Banyak diantara orang – orang Tionghoa (terlebih Tionghoa peranakan dan elite Tionghoa) yang akhirnya memeluk Kristen Protestan maupun Katolik. Ajaran Kristen Protestan dan Kristen Katolik ini dibawa oleh misionaris dan zending yang didatangkan oleh pemerintah Belanda ke Hindia – Belanda ([Noordjanah, 2010](#)).

KESIMPULAN

Kawasan pemukiman Tionghoa di Sidoarjo terbentuk melalui kebijakan *wijkenstelsel* yang diterapkan oleh pemerintah kolonial. Kebijakan *wijkenstelsel* membatasi pergerakan orang

– orang Tionghoa untuk bergaul dengan orang – orang pribumi. Keuletan dan ketekunan orang – orang Tionghoa dalam berdagang membuat kawasan pemukiman Tionghoa di Sidoarjo menjadi salah satu pusat perekonomian. Banyak orang – orang Tionghoa yang bermukim di kawasan tersebut mendirikan toko kelontong.

Toko kelontong merupakan usaha yang telah menjadi ciri khas bagi masyarakat Tionghoa. Secara turun – temurun masyarakat Tionghoa mengelola toko yang dahulu didirikan oleh leluhur mereka yang merantau ke Sidoarjo. Motivasi tinggi dalam berdagang dimiliki oleh mayoritas orang – orang Tionghoa. Toko dianggap sebagai simbol kemandirian. Oleh karena itu, masyarakat Tionghoa pada umumnya lebih tertarik mendirikan sebuah toko atau meneruskan usaha orang tuanya daripada bekerja dengan orang lain. Toko dianggap sebagai ladang penghasilan yang lebih menjanjikan.

Arus modernisasi yang dibawa oleh bangsa Barat menarik perhatian orang – orang Tionghoa, terlebih bagi generasi muda. Pendidikan Barat yang diterima oleh generasi muda Tionghoa melalui sekolah yang didirikan Belanda membuat orang – orang Tionghoa memiliki status sosial yang lebih baik dari orang – orang pribumi. Kemampuan berbahasa Belanda yang dimiliki oleh generasi muda Tionghoa ini memungkinkan untuk terjadinya transfer mentalitas dan kebudayaan. Generasi muda Tionghoa yang berada di kelas menengah juga memungkinkan mereka untuk berpakaian sesuai dengan gaya Eropa. Hal ini dikarenakan pakaian merupakan salah satu simbol identitas dan derajat seseorang dimata masyarakat. Dengan berpakaian ala Barat, generasi muda Tionghoa dipandang lebih baik dimata orang – orang Belanda. Tren budaya Barat telah membuat orang – orang Tionghoa mulai meninggalkan budaya leluhur dan beralih menerapkan budaya barat untuk beradaptasi dengan kehidupan pada masa kolonial.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, A. S. E. (2021). Kritik Sejarah Batik Sidoarjo. *Gorga: Jurnal Seni Rupa, 10(1)*, 137–151. <https://doi.org/10.24114/gr.v10i1.24626>
- Basundoro, P. (2012). Penduduk dan hubungan antar etnis di Kota Surabaya pada Masa Kolonial. *Paramita: Historical Studies Journal, 22(1)*.
- Christian, S. A. (2017). Identitas budaya orang tionghoa Indonesia. *Jurnal Cakrawala Mandarin, 1(1)*, 11–22. <http://dx.doi.org/10.36279/apsmi.v1i1.11>
- Darini, R. (2011). Kebijakan Negara dan Sentimen Anti-Cina: Perspektif Historis. *Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Ika, S. D. (2013, August 4). Silang Budaya Jawa – Tionghoa di Surabaya. *Jawa Pos*.
- Kuntowijoyo. (2018). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Rustopo. (2007). *Menjadi Jawa: Orang-orang Tionghoa dan Kebudayaan Jawa di Surakarta, 1895-1998*. Penerbit Ombak
- Lombard, D. (2005). *Nusa Jawa silang budaya: jaringan Asia*. Gramedia.
- McCullagh, C. B. (2010). *Logic of History: Perspektif modernisme*. Lilin Persada Press.
- Noordjanah, A. (2010). *Komunitas Tionghoa di Surabaya (1910 – 1946)*. Penerbit Ombak.

- Panitia Penggali Sejarah Kabupaten Sidoarjo. (2009). *Sejarah Sidoarjo*. Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo.
- Prasetyo, Y. (2020). Dari Pikulan ke Kelontong: Tionghoa dan Toko Kelontong Yogyakarta 1900–1942. *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1), 63–78. <https://doi.org/10.19105/ejpis.v1i2.3305>
- Prasetyo, Y. (2023). From Old Fashioned to Stylish: Perubahan Tren Busana Elite Tionghoa Batavia 1890–1942. *Keraton: Journal of History Education and Culture*, 4(2), 88–96. <https://doi.org/10.32585/keraton.v4i2.3497>
- Sidoarjo, T. P. S. (2006). Jejak Sidoarjo: dari Jenggala ke Suriname. *Sidoarjo: Ikatan Alumni Pamong Praja Sidoarjo*.
- Suryadinata, L. (2014). Negara dan Minoritas Tionghoa di Indonesia. *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia*, 1(2), 2.
- Tedjokusumo, H. (2020, July 26). *Wawancara pribadi*.
- van Dijk, K. (2005). Sarung, Jubah, dan Celana: Penampilan sebagai sarana pembedaan dan diskriminasi. *Outward Appearances: Trend, Identitas Dan Kepentingan (Pp. 57-120)*. LKiS.
- Widodo, D. I., & Nurcahyo, H. (2013). *Sidoarjo tempo doeloe*. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- Yusuf, E. M. (2022). Kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Afdeeling Sidoarjo pada masa kolonial tahun 1859–1931. *Avatara*. 13(1)